



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 Februari 2020

Halaman: 11

► DAMPAK COVID-19

Tingkat Hunian Hotel Terjun Bebas

JOGJA—Pembatasan penerbangan dari luar negeri akibat virus Corona atau *Covid-19* berdampak signifikan pada pariwisata Indonesia, tak terkecuali DIY. Tingkat hunian hotel di masa *low season* tahun ini pun diklaim lebih rendah ketimbang *low season* tahun lalu.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranawa Eryana, menjelaskan tingkat hunian hotel di DIY setelah muncul wabah *Covid-19*, menurun sebesar 10% ketimbang sebelum adanya wabah tersebut. Bahkan pada bulan ini yang masuk dalam *low season*, tingkat hunian hotel di DIY hanya sekitar 35%. "Padahal sebelum adanya *Covid-19*, *low season* [tingkat hunian hotel] masih bisa sekitar 45 persen," ujarnya, Kamis (27/2).

Dia menjelaskan beberapa negara yang jumlah wisatawaninya menurun saat ini di antaranya China, Malaysia, dan Singapura. Wisatawan dari Eropa, kata dia, masih ada, namun jumlahnya juga berkurang. "Wisatawan dari Eropa juga banyak yang membatalkan pemesanan hotel pada Juni hingga September. Padahal bulan-bulan itu adalah masa liburan di Eropa," kata Deddy.

Meski begitu, kondisi tersebut menurutnya masih lebih baik ketimbang Bali. Pasalnya, selama ini Bali didominasi oleh wisatawan mancanegara (wisman), sedangkan Jogja lebih banyak wisatawan lokal. Itulah sebabnya, kini pihaknya mengoptimalkan untuk menggaet wisatawan lokal.

Pajak Hotel & Restoran

Sebenarnya Pemerintah Pusat telah merespons kondisi ini dengan menyiapkan hibah yang meniadakan pajak hotel dan restoran di 10 daerah destinasi wisata, termasuk DIY. Kebijakan ini mulai berlaku pada Maret-Agustus 2020. Selain itu, tarif tiket pesawat juga akan diturunkan untuk memberikan akses murah pada wisatawan lokal.

Dengan dihilangkannya pajak hotel dan restoran ini, setidaknya mampu mengurangi tarif hotel dan restoran sebesar 10% yang diharapkan akan menjadi daya tarik wisatawan lokal. Kendati begitu, kebijakan Pusat ini baru bisa direalisasikan jika pemerintah di tingkat kabupaten/kota sudah menyiapkan petunjuk teknis (juknis).

"Persoalannya, sampai akhir bulan ini, juknis dari Pemkot dan Pemkab di DIY belum ada. Masih menunggu dari Pusat. Kalau juknis ini sudah diterapkan, tidak boleh lagi disalahgunakan oleh hotel dan restoran dengan tetap memungut 10 persen. Kalau masih ada, akan kami tindak," ujarnya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan pihaknya mendukung skema pemberian hibah pada 10 destinasi ini. "Sampai sekarang kami juga belum tahu bagaimana pelaksanaannya. Kalau sudah ada juknis kami siap," ucapnya.

Selain hibah pengganti pajak, dia juga berharap Pusat dapat memberi hibah untuk promosi agar wisatawan mancanegara yang menunda kunjungannya bisa tetap datang. "Serta promosi bahwa Indonesia bebas Corona," katanya.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005